

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses globalisasi pemerintahan pada daerah Indonesia di tahun 2001 memasuki zaman baru otonomi daerah telah diberlakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang telah revisi ulang menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, menyatakan tentang kewajiban, wewenang, dan hak daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah otonomi daerah (Karin, 2015).

Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang No.33 Tahun 2004. Sistem pembagian keuangan yang efisien, proposional, adil, transparan, demokratis, dan dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pendanaan. Otonomi daerah yang terjadi bukan hanya penyerahan tugas pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah tetapi juga dengan disertai pelimpahan wewenang untuk dapat mengelola pemerintahannya sendiri (Karina, 2015). Diberlakukannya otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk lebih mengembangkan potensi daerahnya. Untuk mengembangkan potensi daerah tersebut, maka pemerintah daerah dapat meningkatkan anggaran belanja modal, sumber-sumber dana yang digunakan

untuk belanja modal yaitu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pada era desentralisasi fiskal saat ini, diharapkan adanya perbaikan kualitas pelayanan pada semua sektor publik, yang paling utama pada sektor publik dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap sektor publik dapat memberikan daya tarik pada investor untuk untuk menaruh investasi di daerah (Niputu, 2014). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan Pemda dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah dengan dilakukannya peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap yaitu peralatan, bangunan, infrastruktur dan harta tetap lainnya (Kusnandar dan Siswanto, 2012). Meningkatnya aset tetap daerah dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah adalah pengeluaran modal yang bisa meningkatkan pelayanan publik karena hasil dari pengeluaran belanja modal (Kusnandar dan Siswanto, 2012).

Pengalokasian belanja modal pemerintah sebagian berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah yang terus meningkat mampu berkontribusi sehingga berdampak pada pelayanan sektor publik yang baik. Mengenai perihal tentang perimbangan keuangan antar pemerintahan pusat kepada daerah berdasarkan undang-undang No.33 tahun 2004, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, komponen tersebut merupakan merupakan sumber penerimaan suatu daerah yaitu pendapatan asli daerah. Tujuan dari pendapaatan asli daerah

(PAD) itu sendiri memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi pendapatan daerah masing-masing. Dalam mengurangi ketimpangan antar daerahnya maka diharapkan adanya peningkatan PAD, tetapi ketimpangan di setiap daerah masih sangat terlihat jelas. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukannya dana perimbangan sebagai pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mengurangi tingkat ketimpangan yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh Nurin Hidayati (2016) menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal tersebut dikarenakan PAD lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja operasional. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh I putu dan Dwirandra (2014) memperoleh hasil bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal.

Perbedaan kemampuan keuangan di setiap daerah, dalam hal pembelanjaan kegiatan pemerintahannya, sehingga terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Pemerintah daerah berupaya dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk belanja kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi (Ni Putu, 2014). Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang sejalan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah daerah bisa lebih mengalokasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang didapatnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya.

Sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya disebut dengan Dana Alokasi Umum. Ni Putu (2014) yang melakukan penelitian di Kabupaten/Kota di provinsi Bali memperoleh hasil dimana terdapatnya pengaruh positif dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Kusnandar dan Siswantoro (2012) memperoleh hasil bahwa tidak terdapatnya pengaruh dana alokasi umum (DAU) terhadap belanja modal. Kondisi ini dikarenakan dana alokasi umum yang diterima oleh daerah hanya untuk membiayai pengeluaran rutin saja, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal.

Perkembangan ekonomi diukur dari suatu kegiatan pembangunan daerah, hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi dapat mengukur tingkat perkembangan pada sektor perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kondisi kegiatan perekonomian yang mengakibatkan produksi barang dan jasa bertambah sehingga terjadinya perkembangan ekonomi yang meningkat setiap tahun. Tekanannya pada tiga aspek yakni: proses, output per kapita, dan jangka panjang. Bataineh (2012) menyatakan bahwa Pengeluaran untuk kemiskinan pedesaan dan pertumbuhan produktivitas di India menunjukkan hasil bahwa untuk mengurangi kemiskinan daerah pedesaan, maka pemerintah harus dapat mengutamakan investasi seperti perbaikan akses jalan pedesaan, sektor pertanian dan pelayanan publik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi daerah dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Namun ada pula pengeluaran pemerintah yang banyak mengurangi pertumbuhan ekonomi disebabkan adanya

kegiatan yang dilakukan kurang efisien, mengeluarkan biaya yang terlalu banyak dan beban pada sistem ekonomi (Ram, 1986).

Berdasarkan perkembangan yang berada di Provinsi Jawa Timur pada alokasi proporsi belanja modal lebih sedikit dibandingkan dengan alokasi belanja operasi seperti belanja pegawai, belanja barang. Hal ini yang mengakibatkan belanja modal sangat minim dan tidak dapat maksimal. Padahal dari belanja modal tersebut yang akan mendatangkan manfaat yang lebih banyak bagi daerah dan meningkatkan pelayanan publik, data tersebut diperoleh dari data laporan APBD yang dapat diakses pada website direktoral jenderal perimbangan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di penelitian ini, bahwa APBD dan pelaksanaannya pemerintah daerah untuk menyusun lebih banyak mengalokasikan pada anggaran sektor belanja operasi dari pada belanja modal. Belanja modal pengeluaran pemerintah daerah yang sangat efektif untuk meningkatkan pelayanan umum. Dengan ini, dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal ?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi antara Pendapatan Asli Daerah dengan belanja modal ?
4. Apakah Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi antara Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas tersebut, maka penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pada:

1. Menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
2. Menguji pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.
3. Menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal.
4. Menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai pemoderasi antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat digunakan untuk instansi pemerintah
 1. Untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur sebagai bahan pertimbangan untuk pengalokasian belanja modal.
 2. Pemerintahan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Bagi STIE PERBANAS Surabaya

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut khususnya pada pembahasan bidang yang serupa.
2. Dapat digunakan sebagai gambaran umum oleh pembaca untuk dapat mengulas masalah pajak dan belanja modal dengan objek penelitian sama.
3. Untuk melengkapi penelitian telah dilakukan penelitian yang serupa terdahulu dan dengan variabel membuktikan apakah yang lebih spesifik akan tetap hasil yang sama atau sebaliknya hasil berbeda dari penelitian sebelumnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan proposal skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain yang saling berkaitan. Adapun sistematikanya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan proposal.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang menguraikan tentang penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dan menjadi perbandingan dengan penelitian ini. Selain itu, pada

bab ini juga berisi landasan teori yang berkaitan dengan persistensi laba yang mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran subyek penelitian, analisis data yang terdiri dari analisis deskriptif, analisis statistik dan uji regresi linear berganda, serta pembahasan yang mengarah pada perumusan masalah dan hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian ini yang menjawab mengenai Hipotesis Penelitian, Keterbatasan Penelitian serta saran yang diharapkan berguna untuk penelitian-penelitian selanjutnya.